MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 297 /DJMT.1/ST.KP7.1/IX/2024

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja diperlukan adanya pedoma Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Dasar :
1. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
2. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 005.05.1.663122/2024 tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Jefri Ardianto, S.T., M.M./ 197704142009041005, Penata Tingkat I (III/d), Kabag Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat;
2. Welly Walbarkah, S.Kom./ 198507202015031002, Penata (III/c), Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Sekretariat;
3. Rionaldo Sahat Sigalingging, S.Kom./ 198408112009041005, Penata Tingkat I (III/d), Kasubbag Kelembagaan dan Pelaporan Sekretariat;
4. Tina Rizkiati, S.E., M.M./ 198209032009042006, Penata (III/c), Kasubbag Ketatalaksanaan Sekretariat;
5. Alvin Bagus Setyawan, S.T./ 198812302020121006, Penata Muda (III/a), Pranata Komputer Ahli Pertama;
6. Vina Rahmajulia, S.E./PPNPN.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 3 sd. 5 Oktober 2024;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,



Sodikin